



**KABUPATEN**  
**KEPULAUAN ANAMBAS**

**2026**



# **RANCANGAN AKHIR** **RENCANA KERJA**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**



[bpkpd.anambas@gmail.com](mailto:bpkpd.anambas@gmail.com)

Jln. imam Bonjol, No 36 Tarempa



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2026 ini.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Disamping itu melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja pada setiap unit kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

Akhir kata, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua, Aamiin.... Berbagai kelemahan yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 20 Agustus 2025

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19701122 200212 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematika Penulis	8
BAB II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	10
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	29
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	74
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	75
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	75
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	75
III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	80
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	89
BAB V. Penutup	117

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Kerja (Renja) dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menyusun program kegiatan sebagaimana tindak lanjut dalam KUA dan PPAS dan perencanaan penganggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

## **I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui:

1. Program dan kegiatan BPKPD Tahun 2026;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD Tahun 2026;
3. Indikator kinerja BPKPD Tahun 2026;
4. Kelompok sasaran BPKPD Tahun 2026;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPKPD Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja), landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja), maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja).

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD tahun lalu dan capaian Rencana Strategis (Renstra) PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) PD, serta program dan kegiatan dan sub kegiatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berisikan indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025).

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2024 sejumlah Rp137.510.459.896,93 (Seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp115.229.118.628,00 (Seratus lima belas milyar dua

ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 83,80%.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator kinerja program ini yaitu cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan target sebesar 100%. Program ini terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan BPKPD dan bersifat rutin meliputi penyusunan perencanaan-penganggaran dan evaluasi, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang serta pemeliharaan Barang Milik Daerah. Kelompok sasaran pada program ini adalah aparatur di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya, alokasi anggaran guna membiayai program ini adalah sebesar Rp15.495.870.435,00 dengan realisasi sebesar Rp12.880.012.746,00 atau sebesar 83,12%. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian indikator program ini adalah sebesar 97%. Untuk lebih jelasnya, deskripsi singkat pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang ditargetkan sebesar 100%. Dari alokasi anggaran Rp3.700.000,00 terealisasi sebesar Rp3.640.000,00 atau sebesar 98,38%. Dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi pada kegiatan ini,

keseluruhan laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran hingga evaluasi kinerja perangkat daerah dapat tersusun sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, capaian kinerja pada kegiatan ini telah mencapai 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang ditargetkan sebesar 100%. Dari alokasi anggaran Rp10.693.145.765,00 terealisasi sebesar Rp8.866.573.205,00 atau sebesar 82,92%. Dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi, kegiatan ini telah berhasil mencapai sejumlah target seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN bagi 38 ASN serta penyusunan laporan keuangan BPKPD yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang ditargetkan sebesar 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp92.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp87.400.000,00 atau sebesar 95%. Kegiatan ini berfokus pada pengadaan pakaian dinas bagi para ASN dan PTT dilingkungan BPKPD sebanyak 92 paket. Secara umum, kegiatan ini telah berjalan lancar sebagaimana mestinya, sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja jumlah pengadaan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan sebesar 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp1.084.397.371,00 terealisasi sebesar Rp862.724.912,00 atau 79,56%. Meskipun jika dilihat dari penyerapan anggaran kegiatan ini memiliki tingkat penyerapan yang rendah, namun keseluruhan kegiatan ini

berjalan lancar sebagaimana mestinya, sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan sebesar 100%. Untuk kegiatan ini, alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp617.090.779,00 dan terealisasi sebesar Rp387.196.400,00 atau sebesar 62,75%. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2024 kegiatan ini ditujukan kepada pengadaan bangunan gudang arsip dan gudang aset kantor BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengadaan bangunan gudang kantor sebagai tempat penyimpanan arsip serta sejumlah aset menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kegiatan ini juga ditujukan dalam memberikan dukungan dalam memberikan dukungan dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas jabatan bagi pejabat di BPKPD sebanyak 2 (dua) unit. Kegiatan ini juga memberikan dukungan dalam bentuk pengadaan AC kantor sebanyak 2 (dua) unit, laptop sebanyak 3 (tiga) unit, PC sebanyak 2 (dua) unit, dan printer sebanyak 7 (tujuh) unit. Jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.701.145.020,00 terealisasi sebesar Rp2.437.273.129,00 atau sebesar 90,23%. Kegiatan ini berfokus kepada penyediaan jasa layanan komunikasi, air, listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, hingga penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan tenaga kebersihan selama 12 bulan. Dalam pelaksanaannya

telah berjalan lancar dan tidak terdapat kendala, sehingga capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang ditargetkan 100%. Dari alokasi anggaran sebesar Rp304.391.500,00 terealisasi sebesar Rp235.205.100,00 atau sebesar 77,27%. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini difokuskan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda tiga, speed boat, pemeliharaan alat pendingin ruangan, pemeliharaan genset, pemeliharaan PC, laptop, printer dan pemeliharaan bangunan gedung kantor BPKPD. Dari hasil evaluasi, capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100%.

## **II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Persentase Silpa terhadap APBD. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 84,02%. Anggaran program ini sebesar Rp119.406.939.061,93 dengan realisasi sebesar Rp100.328.183.055,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran dari rencana anggaran Rp2.755.115.030,00 terealisasi sebesar Rp1.944.032.183,00 atau 70,56% dengan output Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dari rencana anggaran Rp512.009.000,00 terealisasi sebesar Rp444.054.714,00 atau 86,73% dengan output Persentase Koordinasi dan

Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp874.141.284,00 terealisasi sebesar Rp826.849.740,00 atau 94,59% dengan output Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp113.759.806.260,51 terealisasi sebesar Rp96.042.611.285,00 atau 84,43% dengan output Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp1.505.867.487,42 terealisasi sebesar Rp1.070.635.133,00 atau 71,10% dengan output Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

### **III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Cakupan pengelolaan asset daerah. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 85,19%. Anggaran program ini sebesar Rp1.809.586.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.541.536.824,00. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp1.809.586.000,00 terealisasi sebesar Rp1.541.536.824,00 atau

85,19% dengan output Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% terealisasi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

#### **IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Persentase tingkat pertumbuhan PAD. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 60,07%. Anggaran program ini sebesar Rp798.064.400,00 dengan realisasi sebesar Rp479.386.003,00. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp798.064.400 terealisasi sebesar Rp479.386.003,00 atau 60,07% dengan output Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 100% terealisasi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

Adapun realisasi fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada tabel berikut:

**Tabel II.1 Realisasi Fisik dan Keuangan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN				
			KEUANGAN			FISIK	
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN	
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BULAN LAPORAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.495.870.435,00</b>	<b>12.880.012.746,00</b>	<b>83,12</b>			
1	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>98,38</b>			
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.150.000,00	3.100.000,00	98,41	0,00	100,00	0,00
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	550.000,00	540.000,00	98,18	0,00	100,00	0,00
2	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10.693.145.765,00</b>	<b>8.866.573.205,00</b>	<b>82,92</b>			
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.010.523.765,00	8.192.991.605,00	81,84	5,96	95,39	6,94

4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	681.860.000,00	672.951.600,00	98,69	0,49	100,00	0,50
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	762.000,00	630.000,00	82,68	0,00	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>87.400.000,00</b>	<b>95,00</b>			
6	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	92.000.000,00	87.400.000,00	95,00	0,06	100	0,07
<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.084.397.371,00</b>	<b>862.724.912,00</b>	<b>79,56</b>			
7	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	245.012.991,00	197.644.110,00	80,67	0,14	96,33	0,17
8	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	142.281.380,00	85.553.900,00	60,13	0,06	100	0,10
9	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	132.595.000,00	116.181.900,00	87,62	0,08	100	0,10
10	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	46.200.000,00	29.320.000,00	63,46	0,02	100	0,03
11	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	518.308.000,00	434.025.002,00	83,74	0,32	100	0,38
<b>5</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>617.090.779,00</b>	<b>387.196.400,00</b>	<b>62,75</b>			

12	PENGADAAN KENDERAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDERAAN DINAS JABATAN	78.329.900,00	73.140.000,00	93,37	0,05	100	0,06
13	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	313.458.434,00	104.000.000,00	33,18	0,08	92,78	0,21
14	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	225.302.445,00	210.056.400,00	93,23	0,15	100	0,16
<b>6</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.701.145.020,00</b>	<b>2.437.273.129,00</b>	<b>90,23</b>			
15	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.119.600,00	100.945.170,00	96,04	0,07	100	0,08
16	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.089.028,00	109.853.150,00	90,72	0,08	100	0,09
17	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.474.936.392,00	2.226.456.809,00	89,96	1,62	100	1,80
<b>7</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHN DAERAH</b>	<b>304.391.500,00</b>	<b>235.205.100,00</b>	<b>77,27</b>			
18	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.237.500,00	102.142.100,00	75,53	0,07	100	0,10
19	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.060.000,00	33.607.000,00	48,56	0,02	100	0,09

20	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.094.000,00	99.456.000,00	99,36	0,07	100	0,07
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>119.406.939.061,00</b>	<b>100.328.183.055,00</b>	<b>84,02</b>			
<b>8</b>	<b>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH</b>	<b>2.755.115.030,00</b>	<b>1.944.032.183,00</b>	<b>70,56</b>			
21	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	61.410.860,00	43.493.727,00	92,78	0,03	100	0,04
22	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	50.700.000,00	47.037.364,00	92,78	0,03	100	0,04
23	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	64.351.150,00	59.634.800,00	92,67	0,04	100	0,05
26	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	54.600.000,00	38.494.800,00	70,50	0,03	100	0,58
27	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	800.900.000,00	659.024.560,00	82,29	0,48	100	0,58

28	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	678.848.000,00	600.287.400,00	88,43	0,44	100	0,49
29	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	488.443.920,00	241.079.596,00	49,36	0,18	100	0,36
30	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	191.459.500,00	149.276.674,00	77,97	0,11	85,83	0,12
31	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	122.167.500,00	105.703.262,00	86,52	0,08	96,22	0,09
32	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	214.634.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH</b>	<b>512.009.000,00</b>	<b>444.054.714,00</b>	<b>86,73</b>			
33	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	470.467.000,00	404.147.155,00	85,90	0,29	100	0,34

34	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	41.542.000,00	39.907.559,00	96,07	0,03	100	0,03
<b>10</b>	<b>KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>874.141.284,00</b>	<b>826.849.740,00</b>	<b>94,59</b>			
35	REKONSILIASI DAN VERIVIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN- LO DAN BEBAN	84.658.800,00	80.400.000,00	94,97	0,06	94,97	0,06
36	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	382.502.984,00	376.637.950,00	98,47	0,27	100	0,28
37	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	187.784.000,00	187.653.890,00	99,93	0,14	100	0,14
38	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	91.090.000,00	86.892.200,00	95,39	0,06	100	0,07

39	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	128.105.500,00	95.265.700,00	74,37	0,07	95,05	0,09
<b>11</b>	<b>PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>113.759.806.260,51</b>	<b>96.042.611.285,00</b>	<b>84,43</b>			
40	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.959.397.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	111.800.408.879,00	96.042.611.285,00	85,91	69,84	100	0,00
<b>13</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.505.867.487,42</b>	<b>1.070.635.133,00</b>	<b>71,10</b>			
42	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	1.505.867.487,42	1.070.635.133,00	71,10	0,78	99,97	1,09
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.809.586.000,00</b>	<b>1.541.536.824,00</b>	<b>85,19</b>			
<b>13</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.809.586.000,00</b>	<b>1.541.536.824,00</b>	<b>85,19</b>			
43	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	642.802.000,00	620.539.800,00	96,54	0,45	100	0,47
44	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.166.784.000,00	920.997.024,00	78,93	0,67	92,20	0,78

<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>798.064.400,00</b>	<b>479.386.003,00</b>	<b>60,07</b>			
<b>14</b>	<b>PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>798.064.400,00</b>	<b>479.386.003,00</b>	<b>60,07</b>			
45	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	106.729.000,00	69.154.100,00	64,79	0,05	94,40	0,07
46	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	173.977.500,00	100.312.522,00	57,66	0,07	74,17	0,09
47	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	146.099.400,00	97.768.850,00	66,92	0,07	100	0,11
48	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	179.000.000,00	107.256.631,00	59,92	0,08	95,80	0,12
49	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	192.258.500,00	104.893.900,00	54,56	0,08	96,88	0,14
	<b>JUMLAH</b>	<b>137.510.459.896,93</b>	<b>115.229.118.628,00</b>	<b>83,80</b>		<b>97,89</b>	



<b>Bidang Anggaran</b>												
4	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P tahun berjalan yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen yang harus disusun tepat waktu*100%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
<b>Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>												
5	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</b>												
6	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan *100%	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	3,40%	2,53%	2,77%	6 %

Dari Tabel II.3 Capaian Hasil Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehinggatidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar A (80,60) namun hanya terealisasi sebesar BB (72,61), hal ini disebabkan masih adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan dan Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P dapat dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
5. Sedangkan untuk Capaian Indikator Kinerja Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dapat dikategorikan Sangat Rendah dengan realisasi hanya 2,77% dari target 6%, dengan capaian Kinerja hanya 46,17%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:
  - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
  - b. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen;

- c. Belum adanya penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak seperti berupa penyegelan untuk Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selama ini metode yang dilakukan dengan pendekatan persuasif yang dan sanksi yang diberikan juga berupa sanksi administratif yakni dengan mengenakan denda;
- d. Personil di Bidang Pengelolaan PAD yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas (yang berkompeten) maupun kuantitas. Sementara pengawasan pajak yang ada di beberapa Kecamatan yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah harus terus dilakukan;
- e. Penyusunan target pajak yang terlalu tinggi, tidak melihat realisasi tahun sebelumnya.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal diatas menjadi concern tersendiri di BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.3**  
**Kondisi Pegawai ASN BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas**  
**Berdasarkan Jenis Klamin**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	40 Orang
2.	Perempuan	32 Orang
	<b>Total</b>	<b>72 Orang</b>

Dari total 72 orang jumlah pegawai ASN di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu sebanyak 40 orang sementara perempuan hanya berjumlah 32 orang. Adapun untuk jumlah ASN berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di lingkungan BPKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	6	-
3.	Eselon IV	9	2
4.	Fungsional dan Pelaksana	32	22
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>24</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah ASN berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di lingkungan BPKPD yaitu terdapat 1 orang laki-laki pejabat eselon II, 6 orang laki-laki yang menjabat eselon III, 9 orang laki-laki yang menjabat eselon IV dan 2 orang perempuan yang menjabat eselon IV, selanjutnya untuk jabatan fungsional dan pelaksana diisi oleh 32 laki-laki dan 22 orang perempuan.

### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun 2024, BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 1 urusan, 4 program, 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.6**  
**Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKPD Tahun 2024**

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah/Kota</b>	1.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Sub Kegiatan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			2.	Sub Kegiatan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			3.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		3.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		4.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			2.	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			4.	Sub Kegiatan - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			5.	Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		5.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2.	Sub Kegiatan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			3.	Sub Kegiatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		6.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		7.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

<b>2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah</b>				3.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8.	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				2.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
				3.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				4.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
				5.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
				6.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
				7.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				8.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				9.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				10.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				11.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
				12.	Sub Kegiatan - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

		9.	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
				2.	Sub Kegiatan -Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		10.	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	1.	SubKegiatan - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				2.	Sub Kegiatan - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				3.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				4.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
				5.	Sub Kegiatan - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		11.	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				2.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
		12.	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3.		13.	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Penyusunan Standar Harga
				2.	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.		14.	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	1.	Sub Kegiatan - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
				2.	Sub Kegiatan - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
				4.	Sub Kegiatan - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				5.	Sub Kegiatan - Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

Dari sejumlah program/kegiatan diatas, perlu dilakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang pada ketercapaian sasaran. Adapun capaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.7  
Pengukuran Kinerja Utama  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B(67)	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,60)	BB (72,61)	90,09%

2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	2,77%	46,17%

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sebesar Rp115.229.118.628,00 atau 83,80% dari total anggaran sebesar Rp137.510.459.896,93,00. Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel II.8**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan**  
**Pencapaian Renstra BPKPD s/d Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Setiap Tahun						Capaian Setiap Tahun		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota</b>	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	97	96	97
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	90	100



9.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	90	91	100
12.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan asset daerah	66,67	73,30	80	86,60	93,30	100	69,70	70,59	88,24%
13.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	95	98	100

IV.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	3,92	3,98	4,02	4,13	4,47	4,62	-10,92	-2,14	-6,13
14.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	90	92	100

Penjelasan dari tabel II.8 diatas adalah terdapat 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra BPKPD tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra BPKPD tahun 2021-2026. Dari rata-rata realiasi yang telah ditetapkan pada target setiap tahunnya menunjukkan bahwa capaian indikator telah mencapai target, namun tetap ada upaya dalam meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator program dan kegiatan, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan antara lain:

- Peningkatan anggaran: perlu dilakukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.
- Pengembangan sumber daya manusia: perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan jabatan dan berkelanjutan.
- Penguatan koordinasi: perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis.

- Peningkatan monitoring dan evaluasi: perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
- g. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam proses perencanaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selalu mengedepankan pendekatan pembangunan yang reponsif *gender*, dimana pertimbangan terhadap kebutuhan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan selalu menjadi perhatian khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi mendalam terhadap Renja PD di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilakukan dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Pada tahun 2024 BPKPD Kabupaten Kepulauan

Anambas telah melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

**1. Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program berisi 7 (tujuh) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

**2. Persentase Silpa terhadap APBD**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program yang berisi 5 (lima) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

**3. Cakupan pengelolaan asset daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program yang berisi 1 (satu) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

**4. Persentase tingkat pertumbuhan PAD**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan program yang berisi 1 (satu) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

Capaian kinerja pelayanan BPKPD pada Review Renstra Tahun 2021-2024 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam table berikut:

**Tabel II.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Indikator	Formulasi	Target Renstra PD (%)						Capaian Setiap Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah												
1	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P yang harus disusun *100%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah												
3	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan BMD yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pendapatan Asli Daerah												
4	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan *100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	3,40%	2,53%	2,77%

Dari tabel diatas dapat diketahui bawa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki tiga urusan utama yaitu urusan pengelolaan keuangan daerah, urusan pengelolaan barang milik daerah dan urusan pendapatan asli daerah. Urusan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
  - Penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dan Audited, Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD, Laporan DTH persemester.
  - Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD-P, seperti Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD, Dokumen Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS, Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD.

Capaian indikator pada urusan pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari:

- Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen APBD dan APBD-P.
  - Tingkat kesesuaian laporan keuangan dan dokumen APBD dan APBD-P dengan peraturan perundang-undangan.
- Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Urusan Pengelolaan BMD meliputi Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan, seperti Laporan Rekonsiliasi BMD dan Laporan Penyusunan Standar Harga. Capaian indikator pada urusan pengelolaan barang milik daerah dapat diukur dari:

- Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan rekonsiliasi BMD dan laporan penyusunan standar harga.
- Tingkat kesesuaian laporan rekonsiliasi BMD dan laporan penyusunan standar harga dengan peraturan perundang-undangan.

- **Urusan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Urusan pengelolaan PAD meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Capaian indikator pada urusan pengelolaan pendapatan asli daerah dapat diukur dari:

- Jumlah Penerimaan PAD yang meningkat setiap tahunnya.

### **II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan Global Nomor XVI yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Sasaran Globalnya yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi :

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selalu berkembang;
2. Belum Perwujudan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK;
3. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel;
5. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku;
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Daerah sehingga belum optimalnya konsistensi mekanisme penyusunan anggaran;

8. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah;
9. Rendahnya kapasitas fiskal;
10. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi.

Permasalahan dan isu penting di atas secara tidak langsung akan memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, seperti SPM dan SDG's. Untuk itu optimalisasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan perlu dilakukan guna mempercepat pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya penghapusan terhadap program/kegiatan/ sub kegiatan yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif perlu dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan pembangunan yang bersifat lintas sektor seperti implementasi Kabupaten layak anak yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat memperhatikan suatu Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir yang disebut dengan *stunting*, dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan stunting dengan prevelensi stunting tahun 2023 sebesar 5,07% menurun menjadi 3,9% pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yaitu dalam mengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran sebagai

upaya mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pemabangunan inovatif yang bersifat holistic-tematic, integratif dan spasial untuk diintegrasikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah yang wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas membuat suatu inovasi pelaksanaan digitalisasi pengusulan sampai dengan pelaporan perjalanan dinas yang merupakan pengembangan dan bagian dari *Anambas Single Information System (ASIS)* yang terintegrasi dengan sistem absensi harian (Presensi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Sistem Transaksi non tunai melalui *Anambas Single Information System (ASIS)*, dengan pembuatan Aplikasi ASIPEDI diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam percepatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan memberikan stimulus dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik salah satunya Digitaliasi Pelayanan Publik.

Agenda kegiatan tahun 2026 akan berupaya lebih optimal pada pelaksanaan inovasi daerah, mengingat pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki banyak potensi inovasi daerah yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dikategorikan sebagai daerah yang inovatif. Optimalisasi terhadap implementasi inovasi daerah menjadi konsen berbagai pihak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

**A. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan daerah;
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan mengali potensi pendapatan yang ada;
3. Meningkatkan manajemen dalam pengelolaan barang milik daerah.

**B. Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus/pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

**C. Sarana dan Prasarana**

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;

3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

#### **II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabe III.10**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14.196.765.820,00</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>16.358.947.453,36</b>
1.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>13.378.000,00</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>102.259.000,00</b>
1.	Sub Kegiatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.178.000,00	Sub Kegiatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	75.634.000,00

	Daerah					Daerah				
2.	Sub Kegiatan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.200.000,00	Sub Kegiatan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.625.000,00
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12.940.634.428,64</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14.149.936.834,00</b>
3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	12.315.536.428,64	Sub Kegiatan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	13.519.975.576,00
4.	Sub Kegiatan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	623.898.000,00	Sub Kegiatan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	623.898.000,00

5.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.063.258,00
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase meningkatkan kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>15.678.000,00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase meningkatkan kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>66.156.000,00</b>
6.	Sub Kegiatan - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.678.000,00	Sub Kegiatan - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	66.156.000,00

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.062.544.366	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	950.991.700
7.	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	83.835.333,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	149.675.326,00
8.	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	37.930.920,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	136.762.118,00
9.	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.112.369,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.760.248,00
10.	Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	81.517.500,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	121.990.000,00

			Disediakan					n yang Disediakan		
11.	Sub Kegiatan - Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.000.000	Sub Kegiatan - Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.000.000,00
12.	Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	188.182.000,00	Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	374.586.000,00
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>225.302.445,36</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>225.302.445,36</b>
13.	Sub Kegiatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	225.302.445.36	Sub Kegiatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	225.302.445.36

								Disediakan		
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase meningkatnya layanan penunjang aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>337.031.324,00</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase meningkatnya layanan penunjang aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>442.587.040,00</b>
14.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.582.784,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.679.600,00
15.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.448.540,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	322.907.440,00
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase meningkatnya jumlah barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>180.163.500,00</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase meningkatnya jumlah barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>238.571.500,00</b>

	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>berkondisi baik</b>			<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>berkondisi baik</b>		
16.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	73.967.500,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	84.047.500,00
17.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	38.310.000,00	Sub Kegiatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	54.430.000,00
18.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	67.886.000,00	Sub Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.094.000,00

II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Silpa terhadap APBD	5%	74.595.093.847,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Silpa terhadap APBD	5%	79.697.888.363,64
8.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	1.249.149.175,00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	2.862.735.130,00
19.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	47.557.750,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	61.410.860,00
20.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	38.400.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	50.700.000,00

21.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	5.000.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	13.800.000,00
22.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	5.000.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	13.800.000,00
23.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Terlaksananya Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD	34 Dokumen	40.557.425,00	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Terlaksananya Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD	34 Dokumen	64.351.150,00
24.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	30.600.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	54.600.000,00
25.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	2 Dokumen	350.000.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	2 Dokumen	800.900.000,00

	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Daerah tentang Penjabaran APBD			APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Daerah tentang Penjabaran APBD		
26.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	350.000.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	733.732.000,00
27.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	200.000.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	488.443.920,00

28.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	150.000.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	191.459.500,00
29.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	10.678.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	122.167.500,00
30.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	10.678.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	52.736.100,00
31.	Sub Kegiatan - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	10.678.000,00	Sub Kegiatan - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	214.634.100,00

9.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	214.026.000,00	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	362.641.000,00
32.	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	114.026.000,00	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	247.525.000,00
33.	Sub Kegiatan - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/	40 Orang	100.000.000,00	Sub Kegiatan - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	40 Orang	115.116.000,00

			Kota					/Kota		
10.	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>625.375.000,00</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>1.360.745.500,00</b>
34.	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	84.605.000,00	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	84.605.000,00

35.	Sub Kegiatan - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	210.000.000,00	Sub Kegiatan - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	414.402.000,00
36.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	107.942.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	187.784.000,00

						Kabupaten/ Kota				
37.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	82.828.000,00	Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	88.090.000,00
38.	Sub Kegiatan - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Sub Kegiatan - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00
39.	Sub Kegiatan - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	1 Dokumen	150.000.000,00

	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
40.	Sub Kegiatan - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	102 Orang	100.000.000,00	Sub Kegiatan - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota	102 Orang	285.864.500,00
11.	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>71.730.554.172,00</b>	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>74.138.805.773.64</b>
41.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	1 Laporan	3.000.000.000,00	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	1 Laporan	3.000.000.000,00

			Mendesak					Mendesak		
42.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	52 Laporan	68.730.554.172,00	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten /Kota	52 Laporan	71.138.805.773,64
<b>12.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>775.989.500,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>972.960.960,00</b>
43.	Sub Kegiatan - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	775.989.500,00	Sub Kegiatan - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	972.960.960,00

<b>III.</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Cakupan pengelolaan asset daerah</b>	<b>100%</b>	<b>788.800.000,00</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Cakupan pengelolaan asset daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.744.407.800,00</b>
<b>13.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>788.800.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>4.744.407.800,00</b>
44	Sub Kegiatan - Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	123.800.000,00	Sub Kegiatan - Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	766.119.000,00
45	Sub Kegiatan - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	95.000.000,00	Sub Kegiatan - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	209.108.000,00
46	Sub Kegiatan - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	95.000.000,00	Sub Kegiatan - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	780.441.600,00

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 | 68**

47	Sub Kegiatan – Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Sub Kegiatan – Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.299.810.600,00
48	Sub Kegiatan – Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Sub Kegiatan – Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	270.282.300,00
49	Sub Kegiatan - Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	95.000.000,00	Sub Kegiatan - Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	559.726.700,00
50.	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	1 Laporan	90.000.000,00	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	1 Laporan	280.607.600,00

			Barang Milik Daerah			Daerah		Barang Milik Daerah		
51.	Sub Kegiatan – Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	90.000.000,00	Sub Kegiatan – Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	578.312.000,00
<b>IV.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase tingkat pertumbuhan PAD</b>	<b>4,62%</b>	<b>496.911.659,00</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase tingkat pertumbuhan PAD</b>	<b>4,62%</b>	<b>1,552,664,280.00</b>
<b>14.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>496.911.659,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,552,664,280.00</b>
52.	Sub Kegiatan – Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan – Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00

53.	Sub Kegiatan - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00
54.	Sub Kegiatan - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	0	Sub Kegiatan - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	70.000.000,00
55.	Sub Kegiatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	291.907.679,00	Sub Kegiatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	291.907.679,00
56.	Sub Kegiatan - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	1 Laporan	68.512.000,00	Sub Kegiatan - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	1 Laporan	68.512.000,00

			Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			Daerah		n Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
57.	Sub Kegiatan - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	0	Sub Kegiatan - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	240.000.000,00
58.	Sub Kegiatan - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	0	Sub Kegiatan - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	100.000.000,00

59	Sub Kegiatan - Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan - Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	70.000.000,00
60	Sub Kegiatan - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	100.000.000,00
61	Sub Kegiatan - Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	68.512.000,00	Sub Kegiatan - Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	62.244.601,00
62	Sub Kegiatan - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 | 73**

63.	Sub Kegiatan - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	67.979.980,00	Sub Kegiatan - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	
64.	Sub Kegiatan - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	0	Sub Kegiatan - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	70.000.000,00	
<b>Total</b>					<b>90.077.571.326,00</b>	<b>Total</b>					<b>102,353,907,897.00</b>

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 64 Kegiatan

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 64 Kegiatan

## **II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2026 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Rencana Kerja (Renja) adalah rutinitas perencanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Agenda Pembangunan Nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Ranwal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2026-2029, yaitu :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Agenda Pembangunan Nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

#### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dituntut

untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Untuk itu disusun Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah *“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Sejahterah”*. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif ;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritime dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan daerah, penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk mendukung misi ke 3 (tiga) yaitu *“Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif”*.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan

yang diusung ialah **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”**.

Rancangan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kesetaraan gender serta melanjutkan pengembangan infrastruktur yang merata;
3. Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi biru;
4. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan ekonomi kreatif;
5. Memperkuat reformasi birokrasi.

Pada penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2026, keselerasan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pada prioritas ke 5 (lima) yaitu *“Memperkuat Reformasi Birokrasi”*. Untuk itu agenda kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2026 akan diarahkan pada hal-hal demikian.

Memperhatikan hal diatas, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel;

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel III.1  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB (75)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB (73,87)
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
		Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Persentase	Tepat Waktu (100%)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Persentase	6%

### III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjalankan satu urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan bidang keuangan, maka pada penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2026 mencakup 4 program, 14 kegiatan dan 68 sub kegiatan, yaitu:

**Tabel III.2  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.788.643.157,44</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	APBD
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	APBD
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	450.000,00	APBD
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	450.000,00	APBD
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.045.285.471,27</b>	<b>APBD</b>

5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.037.755.471,27	APBD
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.330.000,00	APBD
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000,00	APBD
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000,00	APBD
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	APBD
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>292.493.917,81</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.345.727,00	APBD
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.843.951,00	APBD
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.110.900,00	APBD
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.606.839,81	APBD
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.400.000,00	APBD
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.186.500,00	APBD
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>227.609.268,36</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.306.823,00	APBD
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.302.445,36	APBD
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>112.312.000,00</b>	<b>APBD</b>

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.312.000,00	APBD
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	APBD
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101.342.500,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.502.500,00	APBD
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.440.000,00	APBD
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.400.000,00	APBD
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>113.190.231.022,98</b>	<b>APBD</b>
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.249.149.175,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.557.750,00	APBD
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	38.400.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	40.557.425,00	APBD
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	30.600.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	350.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan	350.000.000,00	APBD

	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	200.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	150.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10.678.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10.678.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.678.000,00	APBD
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>214.026.000,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	114.026.000,00	APBD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	728.225.070,00	APBD
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	25.663.100,00	APBD
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.188.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	12.142.970,00	APBD
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	8.160.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	285.000.000,00	APBD

	APBD		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	285.000.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.956.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	37.098.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.339.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.339.000,00	APBD
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.339.000,00	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>85.297.579,83</b>	<b>APBD</b>
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	66.776.000,00	APBD
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18.521.579,83	APBD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	359.069.664,00	APBD
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4.205.000,00	APBD
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	176.031.500,00	APBD
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	55.556.964,00	APBD
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	82.828.000,00	APBD

	Kerugian Daerah		
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.339.000,00	APBD
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.339.000,00	APBD
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	APBD
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	68.730.554.172,00	APBD
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>775.989.500,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	775.989.500,00	APBD
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>788.800.000,00</b>	<b>APBD</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>788.800.000,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	123.800.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	95.000.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	95.000.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	95.000.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	90.000.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam Rangka	90.000.000,00	APBD

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>496.911.659,00</b>	APBD
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>496.911.659,00</b>	APBD
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29.770.200,00	APBD
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	111.871.118.709,15	APBD
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000,00	APBD
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	109.871.118.709,15	APBD
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	146.520.000,00	APBD
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.520.000,00	APBD
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>399.986.400,00</b>	<b>APBD</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>399.986.400,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	38.858.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.470.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.855.200,00	APBD
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	97.408.900,00	APBD
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	85.843.300,00	APBD
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	72.186.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	34.045.000,00	APBD
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.320.000,00	APBD
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>400.013.600,00</b>	<b>APBD</b>

5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.013.600,00	APBD
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.630.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	85.429.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.400.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	114.751.900,00	APBD
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.000.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	880.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.380.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2.610.700,00	APBD
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	1.782.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.510.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.820.000,00	APBD
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.820.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>127.778.874.180,42</b>	<b>APBD</b>

Direncanakan pada tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan penyebaran lokasi program/kegiatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang yaitu urusan bidang keuangan berupaya melakukan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan

keuangan daerah yang tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang ditunjang dengan aspek yaitu :

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen terhadap PUG dengan memberikan proporsi keahlian dan keterampilan perempuan dalam proses mengelola keuangan daerah baik dari tim teknis TAPD, pelaksanaan forum OPD, bimbingan teknis, musrenbang, rapat-rapat teknis dan sejumlah kegiatan lainnya sebagai bentuk penerapan *responsive gender*.

Meskipun tanpa penganggaran kegiatan khusus, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sejatinya sudah mengakomodir penerapan PUG. Meskipun hasilnya jauh dari kata maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan meningkatkannya ditahun-tahun mendatang.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2026 dan Prakiraan Maju tahun anggaran 2027 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>190.622.961.185,83</b>								<b>137.639.733.734,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>190.622.961.185,83</b>							<b>137.639.733.734,00</b>		
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>						<b>190.622.961.185,83</b>							<b>137.639.733.734,00</b>		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	13.788.643.157,44						-	15.509.799.186,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan</i>	-			100 %	3.600.000,00			-	-	Lingkup BPKPD	-	30.106.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lingkup BPKPD		23.606.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lingkup BPKPD		5.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lingkup BPKPD		500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah															
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lingkup BPKPD		500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	



			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</i>	-			100 %	6.000.000,00			-	-	Lingkup BPKPD	-	132.034.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				85 Paket	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lingkup BPKPD		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lingkup BPKPD		47.034.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas</i>	-			100 %	292.493.917,81			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD	-	693.126.008,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.345.727,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Lingkup BPKPD		100.192.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	21.843.951,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Lingkup BPKPD		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	44.110.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Lingkup BPKPD		112.067.678,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	55.606.839,81	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Lingkup BPKPD		92.042.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	29.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Lingkup BPKPD		42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	91.186.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		196.824.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	227.609.268,36			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD	-	325.302.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	2.306.823,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	225.302.445,36	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		225.302.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya</i>	-			100 %	112.312.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD	-	430.627.707,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	92.312.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		107.720.267,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		322.907.440,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah berkategori baik</i>	-			100 %	101.342.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD	-	233.432.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13 Unit	41.502.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		76.186.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				26 Unit	23.440.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		57.151.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	36.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lingkup BPKPD		100.094.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase penganggaran belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase Penurunan Silpa</i>	-			100 % 11 %	176.034.318.028,39						-	117.363.061.548,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang tersusun</i>	-			100 %	728.225.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	2.800.296.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	25.663.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Organisasi Perangkat Daerah		63.253.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	24.188.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Organisasi Perangkat Daerah		52.221.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				34 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Organisasi Perangkat Daerah		14.214.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				34 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		14.214.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>				34 Dokumen	12.142.970,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		64.351.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				34 Dokumen	8.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		54.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	285.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		772.122.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	285.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		729.942.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				2 Dokumen	24.956.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		439.645.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				1 Dokumen	37.098.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		195.288.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				1 Dokumen	5.339.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		124.610.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	5.339.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		61.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	5.339.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		214.634.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase ketercapaian anggaran kas per periode</i>	-			100 %	85.297.579,83			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	440.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				2 Dokumen	66.776.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		247.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	18.521.579,83	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		193.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase Jumlah Dokumen dan kebijakan pelaporan keuangan yang tersusun</i>	-			100 %	359.069.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	1.459.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				4 Dokumen	4.205.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		88.810.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				2 Laporan	176.031.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Organisasi Perangkat Daerah		417.636.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	55.556.964,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Organisasi Perangkat Daerah		208.610.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				2 Dokumen	82.828.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Organisasi Perangkat Daerah		93.506.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	5.339.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	5.339.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				102 Orang	29.770.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		351.424.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase penganggaran dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>	-			100 %	174.715.205.714,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	111.669.833.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	105.984.651.542,56	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				52 Laporan	68.730.554.172,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		110.669.833.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Persentase realisasi capaian pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah</i>	-			100% undefined	146.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	992.420.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>				2 Dokumen	146.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		992.420.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<i>Persentase Dokumen Laporan Pengelolaan asset daerah</i>	-			<b>100 %</b>	<b>399.986.400,00</b>						-	<b>3.716.873.000,00</b>	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik</i>	-			85.29 %	399.986.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	3.716.873.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				2 Dokumen	38.858.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		956.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	9.470.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		150.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	50.855.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		535.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	97.408.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		456.557.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	85.843.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		323.507.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	72.186.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		553.305.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	34.045.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		583.505.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	11.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		157.579.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tingkat pertumbuhan PAD</b>	-			6.00 %	400.013.600,00						-	1.050.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah</i>	-			14 %	400.013.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah	-	1.050.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1.630.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	85.429.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				5 Unit	114.751.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				2 Obyek Pajak	880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				1 Dokumen	2.610.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1.782.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Wajib Pajak Daerah		170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	3.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Wajib Pajak Daerah		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	2.820.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Wajib Pajak Daerah		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				2 Laporan	1.820.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Wajib Pajak Daerah		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>190.622.961.185,83</b>							<b>137.639.733.734,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-6 atau tahun terakhir, periode tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan komitmen seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 akan dijadikan pedoman/acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas serta peran aktif stakeholders dan masyarakat.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas BPKPD tahun 2026.

Tarempa, 20 Agustus 2026

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701122 200212 1 003